

## Makna Menjadi Aktivist Gerakan Hak-Hak Disabilitas di Bali: Studi Fenomenologis tentang Pengalaman Aktivist Gerakan Sosial

*(The Meaning of Being an Activist of the Disability Rights Movement in Bali: A Phenomenological Study of the Experiences of Social Movement Activists)*

I Made Anom Wiranata<sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

✉ anom\_wiranata@unud.ac.id

**ABSTRACT:** *The disability rights movement is exercised by movement actors who are able to transform their experiences of suffering into power to bring about changes toward the fulfillment of the rights of persons with disabilities. This research discusses the relationship between the reconstruction of past experiences of grievances due to stigma and discrimination, collective identity, and the capacity to be involved in the disability rights movement. By taking a location in Bali, this research uses a qualitative-phenomenology methodology to reveal the meaning of the experiences of the subjects who are disability rights movement activists, in the process of involving themselves in social movements. This article finds that the social movement actors are able to reconstruct their suffering into the capacity to make changes. Their personal identity meets their collective identity as actors in the disability rights movement through interaction with the community which provides space for the emergence of new awareness about rights and advocacy strategies. The UNCRPD ratification, socialized by civil society organizations, opened up opportunities for strengthening interactions and networks between disability rights activists at the national and local levels. This network has strengthened the confidence of activists in Bali to take collective action. The ratification of the UNCRPD is also a momentum for mobilizing movement resources to change the old frame of charity towards a new frame of the fulfillment of rights. Changing the framework was carried out by advocating Regional Regulations in Bali which are in line with the spirit of the UNCRPD. Besides that, activists through their daily activities, show the public that persons with disabilities can be independent and actualize their potential if they get the chance.*

**ABSTRAK:** Gerakan penyandang disabilitas dimotori oleh aktor-aktor gerakan yang mampu mentransformasi pengalaman negatif mereka menjadi daya untuk mewujudkan perubahan ke arah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Riset ini membahas tentang relasi antara rekonstruksi atas pengalaman negatif di masa lalu akibat stigma dan diskriminasi, identitas kolektif, dan kapasitas untuk terlibat dalam gerakan hak-hak disabilitas. Dengan mengambil lokasi di Bali, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif jenis fenomenologi untuk mengungkap makna pengalaman dari tujuh narasumber aktivis gerakan hak disabilitas dalam proses pelibatan diri mereka dalam gerakan sosial. Artikel ini menemukan bahwa narasumber aktor gerakan sosial mampu merekonstruksi pengalaman negatif mereka menjadi kapasitas untuk membuat perubahan. Identitas personal mereka bertemu dengan identitas kolektif sebagai pelaku gerakan hak-hak disabilitas melalui interaksi dengan komunitas yang memberikan ruang bagi munculnya kesadaran baru tentang hak dan strategi advokasi. Ratifikasi UNCRPD yang disosialisasikan oleh organisasi masyarakat sipil membuka kesempatan bagi penguatan interaksi dan jaringan antara aktivis hak-hak disabilitas di tingkat nasional dan di tingkat lokal. Jejaring tersebut menguatkan kepercayaan diri para aktivis di Bali untuk membuat aksi kolektif. Ratifikasi UNCRPD juga menjadi momentum bagi mobilisasi sumber daya gerakan untuk mengubah bingkai lama belas kasihan menuju bingkai baru pemenuhan hak. Pengubahan bingkai tersebut dilakukan melalui advokasi pada pembentukan Peraturan Daerah di Bali yang selaras dengan semangat UNCRPD. Di samping itu, para aktivis melalui kegiatan keseharian, menunjukkan kepada publik bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk mandiri dan mengaktualisasikan potensinya jika mereka mendapatkan kesempatan.

### Keywords:

discrimination;  
disability;  
identity;  
social movement;  
UNCRPD

### Kata Kunci:

diskriminasi;  
disabilitas;  
identitas;  
gerakan sosial;  
UNCRPD

### Diserahkan/Submitted:

20-03-2023

### Diterima/Accepted:

17-07-2023

### Cara Mengutip/How to cite:

Wiranata, I Made Anom. "Makna Menjadi Aktivist Gerakan Hak-Hak Disabilitas Di Bali: Studi Fenomenologis Tentang Pengalaman Aktivist Gerakan Sosial". *Jurnal HAM*. Vol. 14 No. 2, Agustus 2023, 123-136. DOI: 10.30641/ham.2023.14.123-136.

Hak Cipta/Copyrights (c) 2023  
I Made Anom Wiranata

## 1. Pendahuluan

Harapan pemenuhan hak-hak disabilitas bertumbuh seiring dengan pertumbuhan peraturan perundangan yang memuat hak-hak disabilitas di Indonesia, di antaranya adalah UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, sejumlah studi melaporkan masih tingginya diskriminasi dan pelanggaran terhadap HAM penyandang disabilitas di Indonesia.<sup>1</sup> Para penyandang disabilitas masih menemui kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya. Mereka masih mendapatkan kesulitan dalam keseharian mereka seperti kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, akses transportasi, akses transportasi/mobilitas.<sup>2</sup>

Di Bali, penyandang disabilitas juga menghadapi hegemoni budaya yang memandang kondisi disabilitas mereka sebagai akibat dari perbuatan buruk yang mereka lakukan di penjelmaan kehidupan yang lalu.<sup>3</sup> Bagi penyandang disabilitas, tuduhan tersebut dianggap sebagai “vonis mati” yang meruntuhkan semangat. Eksklusi dari aspek budaya juga terasa ketika penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda, mengalami kesulitan untuk bersembahyang di pura-pura besar di Bali karena struktur bangunannya yang menggunakan jalan bertangga yang panjang dan tinggi.<sup>4</sup>

Sebagian penyandang disabilitas memilih untuk tidak menerima keadaan begitu saja dan melakukan upaya untuk mengatasi diskriminasi dan stigma pada dirinya secara personal dan juga pada penyandang disabilitas secara umum. Mereka berkoordinasi untuk mengerahkan sumber daya dan menggunakan kesempatan yang ada untuk memperjuang hak-hak disabilitas. Mereka adalah generasi pertama dari gerakan hak-hak disabilitas di Bali. Mereka masuk dalam arena gerakan sosial yang merupakan sekelompok orang yang melibatkan dirinya dalam upaya untuk mendapatkan, atau menghadang, suatu proses perubahan sosial.<sup>5</sup> Artikel ini membahas tentang proses pemaknaan pengalaman personal menjadi konstruksi identitas kolektif yang kemudian membuka jalan bagi tindakan-tindakan kolektif untuk advokasi hak-hak disabilitas melalui pembentukan Perda maupun mengubah pandangan publik tentang hak-hak disabilitas.

Penelitian sebelumnya tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas cenderung membahas tiga penekanan. Pertama adalah diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas; kedua, hambatan dan pencapaian gerakan hak-hak disabilitas; dan ketiga, kurang maksimalnya peran dari pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian yang membahas tentang diskriminasi dan stigma pada penyandang disabilitas dan keluarganya di antaranya adalah karya dari Nisa<sup>6</sup>, Fanu, Schmidt, dan Virendrakumar<sup>7</sup>, serta Trani, et al.<sup>8</sup> Penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan pada pencapaian dan hambatan dari gerakan penyandang

- 1 Disability Convention Team, “Indonesia Shadow Report: Implementation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities” (Indonesia, 2017); Nicola Edwards, “Disability Rights in Indonesia? Problems with Ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities,” *Australian Journal of Asian Law* 15, no. 1 (2014): 1–15; Komnas HAM, “Mendorong Pengesahan ‘Optional Protocol the Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ (OP-CRPD) Dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas,” 2016.
- 2 Wayan Damai, “Renungan untuk Hari Cacat Sedunia,” in *Suara Berbeda dari Pulau Dewata*, ed. Anton Muhajir and Octavia Asmarani (Denpasar: Bale Bengong, 2022), 359–62.
- 3 Berdasarkan data dari Pemda Provinsi Bali, penyandang disabilitas di Bali berjumlah 12.086 orang suaradewata.com, “12.086 Penduduk Penyandang Disabilitas Ada Di Bali,” August 21, 2021, <https://www.suaradewata.com/read/202108230020/12-086-penduduk-penyandang-disabilitas-ada-di-bali.html>.
- 4 Damai, “Renungan Untuk Hari Cacat Sedunia.”
- 5 Anthony Giddens, *Sociology* (Cambridge: Polity Press, 1993).
- 6 Uswatun Nisa, “Stigma Disabilitas di Mata Orang Tua Anak Difabel di Yogyakarta,” *Inklusi* 50, no. 1 (2021): 75–88, <https://doi.org/10.14421/Ijds.080106>.
- 7 Guy Le Fanu, Elena Schmidt, and Bhaviswa Virendrakumar, “Inclusive Education for Children with Visual Impairments in Sub-Saharan Africa: Realising the Promise of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities,” *International Journal of Educational Development* 91 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.1016/J.Ijedudev.2022.102574>.
- 8 Jean-Francois Trani et al., “Stigma of Persons with Disabilities in South Africa: Uncovering Pathways from Discrimination to Depression and Low Self-Esteem,” *Stigma of Persons with Disabilities in South Africa: Uncovering Pathways from Discrimination to Depression and Low Self-Esteem* 265 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.1016/J.Socscimed.2020.113449>.

disabilitas di antaranya adalah penelitian dari Prastiwi<sup>9</sup>, Parameswara<sup>10</sup>, van den Brink, et al.<sup>11</sup>, serta You dan Hwang<sup>12</sup>, dan Makkasau<sup>13</sup>. Penelitian lainnya membahas tentang kurang efektifnya peran dari pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas seperti tampak pada penelitian Tan dan Ramadhani<sup>14</sup> serta Ndaumanu<sup>15</sup>. Artikel ini mengambil perspektif yang berbeda dari tiga perspektif yang mendominasi tulisan tentang penyandang disabilitas di Indonesia. Alih-alih berhenti pada dampak diskriminasi dan stigma, artikel ini bergerak lebih jauh dengan menyentuh konstruksi makna dari pengalaman aktor-aktor gerakan yang secara langsung mengalami diskriminasi dan stigma, dan kemudian memutuskan untuk melibatkan diri dalam arena gerakan sosial.

Pembahasan akan disajikan dalam tiga subbahasan. Pada subbahasan pertama, dijabarkan pengalaman depresi, stigma, dan diskriminasi para narasumber. Setelah itu konstruksi identitas kolektif sebagai aktivis HAM disajikan dalam subbahasan kedua. Terakhir, dijabarkan tentang mobilisasi gerakan hak-hak penyandang disabilitas.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metodologi kualitatif berjenis fenomenologi *hermeneutik* dengan tujuan memahami makna pengalaman keseharian dari subjek pelaku gerakan hak-hak disabilitas di Bali. Fenomenologi menawarkan cara meneliti yang deskriptif, reflektif, dan interpretif yang berusaha untuk memahami esensi dari pengalaman subjek.<sup>16</sup> Metode ini relevan untuk digunakan dalam penelitian karena fenomenologi menekankan pada konstruksi makna dari pergulatan pengalaman hidup subjek yang menjadi dasar dari tindakannya. Fenomenologi menggambarkan makna dari pengalaman hidup dan hermeneutika menggambarkan interpretasi atas makna tersebut.<sup>17</sup> Pendekatan dari fenomenologi pada dasarnya adalah hermeneutika karena peneliti menafsir makna pengalaman dari subjek atau narasumber.<sup>18</sup>

Penelitian ini melibatkan tujuh orang narasumber aktivis gerakan hak-hak disabilitas. Pemilihan narasumber dilakukan secara *purposif*. Mereka adalah penyandang disabilitas dengan ragam fisik dan ragam sensoris netra yang menjadi pemimpin di komunitasnya masing-masing. Narasumber tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Bali yaitu Denpasar, Tabanan, Gianyar, Jemberana, dan Buleleng. Data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dengan menggali pengalaman dari subjek penyandang disabilitas yang melibatkan diri dalam aktivisme hak-hak disabilitas. Penulis juga mengkaji buku biografi dari narasumber yang ditulis dalam bentuk cerita.

Tabel Narasumber

No.	Subjek	Domisili	Ragam Disabilitas	Pendidikan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Waktu Interview
1	NL	Denpasar	Fisik	S-1	57	Laki-Laki	3 Mei 2022

- 9 Rani Prastiwi, "Pergerakan dan Perjuangan Difabel di Kabupaten Gunung Kidul: Studi Kasus Forum Komunikasi Disabilitas Gunung Kidul" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2009).
- 10 Ananda Vita Parameswara, "Pemenuhan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang)" (Skripsi, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019).
- 11 Amélie van Den Brink, Willem Elbers, and Aisha Ibrahim, "Fragmented yet Together: The Disability Movement in Sierra Leone," *Disability & Society* 36, no. 7 (2021): 1035–52, <https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1782174>.
- 12 Dong Chul You and Se Kwang Hwang, "Achievements of and Challenges Facing the Korean Disabled People's Movement," *Disability & Society* 33, no. 8 (2018): 1259–79, <https://doi.org/10.1080/09687599.2018.1488676>.
- 13 A. Makkasau, "Gerakan Sosial Penyandang Disabilitas di Kota Makassar" (Skripsi, Makassar, UIN Alauddin, 2020).
- 14 Winshery Tan and Dyah Putri Ramadhani, "Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020), <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>.
- 15 Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 131–50, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.
- 16 Clark Moustakas, *Phenomenological Research Method*. (London: Sage Publications, 1994).
- 17 Max van Manen, *Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy* (Albany: State University of New York Press, 1990).
- 18 Allen, Marion and Jensen, Louise, "Hermeneutical Inquiry Meaning and Scope," *Western Journal of Nursing Research* 12 (1990): 241–53, <https://doi.org/10.1177/019394599001200209>.

2	SA	Gianyar	Fisik	SD	45	Perempuan	5 dan 12 Mei 2022
3	WD	Gianyar	Fisik	SMP	44	Laki-Laki	10 dan 19 Mei 2022
4	WG	Buleleng	Netra	SMA	47	Laki-Laki	15 Mei 2022
5	GS	Jemberana	Fisik	SMA	53	Laki-Laki	20 dan 23 Mei 2022
6	AY	Tabanan	Netra	SMA	48	Laki-Laki	17 Mei 2022
7	MB	Buleleng	Fisik	SMK	41	Laki-Laki	22 dan 25 Mei 2022

Saat data terkumpul, peneliti melakukan tahapan analisis data kualitatif yang mencakup: membagi data dalam kode-kode (*coding*); penarikan tema-tema esensial; mencari hubungan antara bagian-bagian data; membuat pernyataan tentang hubungan antar tema.<sup>19</sup> Setelah tema-tema telah tersusun dan hubungan antar tema telah dibuat, peneliti kemudian menginteraksikannya dengan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori interaksi simbolik dan teori gerakan sosial. Teori interaksi simbolik membahas tentang konstruksi makna bagi subjek yang bersumber dari interaksi sosial melalui penggunaan simbol. Teori gerakan sosial memberikan pemahaman tentang penyebab munculnya gerakan sosial dan proses mobilisasi menuju tindakan kolektif.

### 3. Pembahasan

#### 3.1 Pengalaman Depresi, Stigma, dan Diskriminasi

Narasumber penyandang disabilitas akibat sakit atau kecelakaan, mengalami depresi dengan kondisi yang tidak mereka perkirakan sebelumnya seperti dialami narasumber NL, SA, WD, WG, dan AY. Narasumber NL mengurung dirinya di rumah selama dua tahun karena malu dengan kondisi fisiknya. Di rumah ia juga merasa tertekan. Ia mengatakan, “Jujur saya akui bahwa keluarga sangat terpukul merasa malu punya anak penyandang disabilitas.”<sup>20</sup>

Depresi dari penyandang disabilitas mencapai titik puncak seperti yang dialami oleh narasumber SA. Saat memasuki usia pubertas, ia merasa sedih dan kecewa pada dirinya sendiri karena adik dan kakaknya bisa dengan leluasa pergi jalan-jalan ke luar sementara dirinya terisolasi di rumah dan merasa hanya merepotkan keluarganya. Ia menyesali kondisi disabilitas yang dialaminya dan sempat memiliki rencana untuk mengakhiri hidupnya dengan menitip membeli racun nyamuk lewat adiknya.<sup>21</sup>

Narasumber WD memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda dengan SA. Mereka sama-sama penyandang disabilitas fisik akibat terkena polio saat usia anak-anak. Berbeda dengan SA yang kebutuhannya dipenuhi oleh keluarganya, WD harus berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Saat usia anak-anak, ia menjual lukisan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cara merangkak. Ia merasa telah berusaha keras untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok dan untuk memperbaiki kondisi hidupnya, namun tidak membuahkan hasil seperti yang ia harapkan. Untuk makan sehari-hari ia masih kesulitan. Ia merasa Tuhan telah memberikan ketidakadilan. Ia pernah memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara yang singkat namun ia tidak menemukan cara tersebut.<sup>22</sup>

Para penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi dalam berbagai bentuk. Goffman mendefinisikan stigma sebagai fenomena yang di dalamnya seorang individu mendapatkan atribut yang sangat mendiskreditkan dan dia kemudian dikucilkan atau ditolak oleh masyarakat sebagai akibat dari atribut tersebut.<sup>23</sup> Berbeda dengan stigma yang tertanam dalam sikap dan kepercayaan masyarakat, diskriminasi lebih mudah diidentifikasi karena berhubungan dengan perilaku aktual.<sup>24</sup> Diskriminasi mengacu pada segala bentuk pembedaan sewenang-wenang, pembatasan atau pengucilan seseorang berdasarkan atribut atau karakteristik

19 William Gibson and Andrew Brown, *Working with Qualitative Data* (London: Sage, 2009).

20 NL, Interview oleh Penulis, Denpasar, May 3, 2022.

21 SA, Interview oleh Penulis, Gianyar, May 5, 12, 2022.

22 WD, Interview oleh Penulis, Gianyar, May 10, 19, 2022.

23 Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1963).

24 Bruce G. Link and Jo C. Phelan, “Stigma and Its Public Health Implications,” *Lancet* 367 (2006): 528–29, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)68184-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68184-1).

tertentu yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial. Diskriminasi adalah tindakan yang diambil berdasarkan stigma yang sudah ada sebelumnya.<sup>25</sup> Konsep “stigma” dan “diskriminasi” saling terkait dalam arti bahwa stigma menyebabkan orang melakukan tindakan diskriminatif. Diskriminasi, di sisi lain, adalah pemberlakuan stigma dan dengan demikian mendorong dan memperkuat stigma.<sup>26</sup>

Pengalaman negatif dalam bentuk stigma dan diskriminasi adalah dasar dari gerakan hak-hak disabilitas. Semua narasumber menyampaikan pengalaman diskriminasi dari lingkungannya. Seperti yang dialami narasumber WD, penyandang disabilitas fisik yang terlahir di keluarga miskin buruh tani. Dalam usia anak-anak, ia sudah membantu ekonomi keluarga dengan menjual lukisan. Didorong oleh keinginan sederhana menuliskan nama dan tanda tangan pada lukisannya, WD ingin bersekolah untuk belajar baca tulis. Ia mendatangi sejumlah SD dan mengutarakan keinginannya bersekolah. Ia sangat bersedih karena semua sekolah yang ia datangi menolaknya karena kondisi disabilitasnya.<sup>27</sup>

Diskriminasi langsung juga dapat terjadi pada lingkungan terdekat yaitu keluarga. Seperti yang dituturkan oleh narasumber WG. Ia mengalami disabilitas netra (*low vision*) sejak umur dua tahun. Ia merasa ayahnya malu dengan kondisi disabilitasnya. “Ayah saya agak minder memiliki anak seperti saya. Jika berada di tempat ramai, ayah saya menjauh dan tidak menjaga saya.” Saat keluarganya pindah domisili ke Denpasar, ia adalah satu-satunya anggota keluarga yang tidak diikutsertakan pindah domisili. Dengan iming-iming diberikan uang, ia dititipkan di keluarga bibinya di Buleleng.<sup>28</sup>

Penolakan dari pihak sekolah seperti yang dialami oleh WD dan WG adalah bentuk dari diskriminasi langsung.<sup>29</sup> Burns menunjukkan adanya bentuk diskriminasi lainnya yang disebut dengan diskriminasi struktural. Salah satu dimensinya adalah diskriminasi institusional. Jenis diskriminasi ini didasarkan pada norma, aturan, peraturan, prosedur dan posisi tertentu yang menentukan akses pada sumber daya dan menyingkirkan orang-orang lainnya.<sup>30</sup> Narasumber WD menuturkan dirinya pernah mengalami kesulitan untuk menggunakan sarana transportasi sehingga ia membuat modifikasi sepeda motor roda tiga untuk keperluan mobilitas. Saat menggunakan sepeda motor hasil modifikasi, ia sering dihentikan oleh polisi lalu lintas dan beberapa kali mendapatkan kata-kata yang merendahkan.<sup>31</sup>

Dimensi lain dari diskriminasi struktural adalah diskriminasi budaya yaitu diskriminasi yang didasarkan pada paradigma sosial yang tersebar secara luas dan sistem kategorisasi terkait yang apresiasi atas suatu kelompok sosial dan devaluasi kelompok sosial lainnya.<sup>32</sup> Bentuk diskriminasi ini dialami oleh narasumber AY, seorang penyandang disabilitas sensoris netra. Ia sempat bekerja sebagai tukang pijat di Kuta dan melayani panggilan ke hotel. Karena melayani tamu asing, ia sering mendapatkan pembayaran dalam bentuk mata uang asing seperti USD. Ia sempat ingin menukarkan dolar ke *money changer* di Kuta. Kepada sopir di pinggir jalan, ia bertanya lokasi *money changer*. Setelah mendapat petunjuk arah, ia bergegas ke *money changer*. Namun saat akan masuk, petugas *money changer* berkata kepada AY bahwa *money changer* tersebut tidak punya program pemberian sumbangan. Petugas *money changer* tersebut digerakkan oleh paradigma sosial yang mengategorikan penyandang disabilitas sensoris netra sebagai pengemis.<sup>33</sup>

Phelan dan Link menghadirkan varian diskriminasi lainnya yang mereka sebut sebagai *insidious discrimination* yaitu diskriminasi yang bekerja secara halus yang menghalangi penyandang disabilitas untuk merealisasikan dirinya sehingga mereka mendapatkan konfirmasi sesuai dengan stigma yang dilekatkan pada mereka yaitu sebagai orang yang tidak mampu. Akibatnya adalah interaksi sosial yang tidak nyaman, pengangguran, kepercayaan diri yang rendah, kualitas hidup yang rendah, dan jaringan sosial yang terbatas.<sup>34</sup> Diskriminasi jenis ini tampak pada pengalaman narasumber SA, penyandang disabilitas fisik. Sejak mengalami

25 Peter Aggleton, Kate Wood, and Anne Malcolm, “HIV-Related Stigma, Discrimination and Human Rights Violations” (Geneva: UNAIDS, 2005), [https://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc999-humrightsviol\\_en.pdf](https://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc999-humrightsviol_en.pdf).

26 Kate Wood and Peter Aggleton, “Stigma, Discrimination and Human Rights” (London: Thomas Coram Research Unit Institute of Education, University of London, 2010).

27 WD, Interview.

28 WG, Interview oleh Penulis, Denpasar, May 15, 2022.

29 Link and Phelan, “Stigma and Its Public Health Implications.”

30 Tom R. Burns, “Towards a Theory of Structural Discrimination: Cultural, Institutional and Interactional Mechanisms of the ‘European Dilemma,’” in *Identity, Belonging and Migration*, ed. Gerard Delanty, Ruth Wodak, and Paul Jones (Liverpool: Liverpool University Press, 2008), 152–72.

31 WD, Interview.

32 Burns, “Towards a Theory of Structural Discrimination: Cultural, Institutional and Interactional Mechanisms of the ‘European Dilemma.’”

33 AY, Interview oleh Penulis, Tabanan, May 17, 2022.

34 Link and Phelan, “Stigma and Its Public Health Implications.”

polio di usia SD, ia berhenti sekolah dan mengurung diri di dalam rumah. Suatu saat ia pernah pergi ke rumah di sekitar tempat tinggalnya, ia melihat orang-orang memandang dirinya yang ia rasakan sebagai gestur yang merendahkan. Ia sangat bersedih dengan perlakuan dari lingkungannya. Keluarganya merespons kesedihannya SA dengan cara membatasinya ke luar rumah agar tidak mendapatkan hinaan dari orang lain. Orang tuanya menghiburnya bahwa orang tuanya masih mampu mencukupi kebutuhan SA.

Pandangan yang merendahkan dari lingkungan sekitarnya menjadi *insidious discrimination* karena memberi *labelling* yang merendahkan (tidak berkemampuan) menghalangi SA untuk sekadar bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.<sup>35</sup> Tindakan untuk berdiam di rumah kemudian mengkonfirmasi stigma yang telah ada sebelumnya. Stigma dan diskriminasi kepada penyandang disabilitas adalah manifestasi dari bekerjanya kekerasan struktural. Kekerasan struktural menggambarkan struktur sosial-ekonomi, politik, hukum, agama, dan budaya yang menghentikan individu, kelompok, dan masyarakat dalam mencapai potensi penuh mereka. Kekerasan struktural membuat kemampuan aktual seseorang menjadi lebih rendah dibandingkan dengan yang seharusnya.<sup>36</sup>

### 3.2 Konstruksi Identitas Kolektif sebagai Aktivistis HAM

Proses dari narasumber untuk mengendalikan rasa depresi dan frustrasi adalah fase kehidupan yang menentukan dalam proses menjadi aktivis HAM khususnya hak-hak disabilitas. Narasumber WD saat berencana untuk mengakhiri hidupnya, ia berdialog dengan dirinya sendiri, “Jangan lakukan itu. Bersabarlah, saatnya belum tiba. Langkahmu masih panjang. Semua nanti akan jauh lebih baik. Ayo berusaha lebih keras lagi. Percayalah!”<sup>37</sup> Dialog dengan Sang Diri memberikan semangat bagi WD. Ia merasa bersalah karena telah berputus asa dan menyatakan protes kepada Tuhan atas kondisi hidupnya. Narasumber lainnya seperti GS melakukan *self-healing* dengan sikap keikhlasan untuk menerima fakta bahwa memang ada orang yang mendukung dan juga merendahkan penyandang disabilitas. Bagi dirinya, ia menerapkan moto untuk dirinya yaitu, “jangan pernah tanya berapa banyak anggota tubuh yang masih ada, namun tanyalah apa yang dapat dilakukan dengan anggota tubuh yang ada”.<sup>38</sup>

Narasi tentang pengalaman untuk bangkit dari keterpurukan adalah bagian dari identitas personal dari aktor. Identitas personal atau identitas naratif adalah internalisasi makna pengalaman hidup personal dalam bentuk narasi yang terus berkembang. Subjek memiliki makna atas pengalaman hidup yang membekas dan mengalami internalisasi. Pada akhir masa remaja dan masa dewasa, orang-orang mulai menata hidup mereka ke dalam narasi integratif tentang Sang Diri, merekonstruksi masa lalu dan secara imajinatif mengantisipasi masa depan sedemikian rupa untuk memberikan hidup mereka suatu rasa keutuhan dan tujuan hidup.<sup>39</sup> Identitas naratif memberikan pedoman tentang cita-cita yang ingin diraih, standar tentang suatu nilai yang dianggap pantas untuk didukung, dan cara hidup tertentu.

Pemaknaan ulang atas pengalaman hidup dan keputusan untuk mengubah stigma dan diskriminasi menjadi identitas personal dari para narasumber. Identitas tersebut adalah fondasi bagi para aktor penyandang disabilitas untuk melakukan gerakan sosial. Ahli-ahli dalam gerakan sosial menyebutkan peranan identitas kolektif sebagai basis dari gerakan sosial.<sup>40</sup> Tanpa adanya identitas personal, para aktor akan sulit untuk membuka dirinya untuk memiliki identitas kolektif bersama dengan aktor-aktor gerakan penyandang disabilitas lainnya. Identitas kolektif adalah pendefinisian bersama sebagai suatu kelompok. Identitas kolektif bersumber dari persamaan kepentingan,

35 SA, Interview.

36 Johan Galtung, “Violence, Peace, and Peace Research,” *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1996): 167–91, <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.

37 Imaculata Umiyati, *Aku Beda dan Aku Bisa!* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020).

38 GS, Interview oleh Penulis, Jemberana, May 20, 2022.

39 Jonatan Kurzwelly, “Being German, Paraguayan and Germanino: Exploring the Relation between Social and Personal Identity,” *Identity: An International Journal of Theory and Research* 19, no. 2 (2019): 144–56, <https://doi.org/10.1080/15283488.2019.1604348>; Dan P. McAdams, “The Psychology of Life Stories,” *Review of General Psychology* 5, no. 2 (2001): 100–122, <https://doi.org/10.1037/1089-2680.5.2.100>.

40 Alberto Melucci, *Challenging Code* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996); Fransesca Polleta and James M. Jasper, “Collective Identity and Social Movements,” *Annual Review of Sociology* 27 (2001): (283-305, <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.283>; David A. Snow and Robert D. Benford, “Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization,” *International Social Movement Research* 1 (1988): 197–218; Verta Taylor and Nancy E. Whittier, “Collective Identity in Social Movement Communities: Lesbian Feminist Mobilization,” in *Frontiers in Social Movement Theory*, ed. Aldon D. Morris and Carol McClurg Mueller (New Haven: Yale University Press, 1992), 104–32.

pengalaman, dan solidaritas.<sup>41</sup> Identitas kolektif melibatkan kemampuan untuk membedakan antara Sang Diri sebagai kolektivitas dengan “kelompok lainnya” dan diakui oleh “kelompok lainnya” tersebut. Aktor-aktor yang masuk dalam arena gerakan sosial tidak perlu untuk memiliki persamaan ideologis, kepentingan, tujuan yang sudah lengkap dan utuh dengan aktor-aktor lainnya yang berada dalam organisasi gerakan yang sama.<sup>42</sup>

Ketika identitas personal bertransformasi menjadi identitas kolektif, identitas personal tersebut tetap menjadi milik dari aktor secara pribadi. Seperti yang dikatakan oleh Melucci, konstruksi identitas kolektif memiliki proses dinamis yang di dalamnya aktor-aktor bernegosiasi, memahami, dan mengonstruksi tindakan mereka melalui interaksi yang berulang. Identitas pada level individu itu kemudian menjadi identitas kolektif ketika ia merasa memiliki keterhubungan dan solidaritas dengan orang-orang lainnya. Solidaritas adalah proses konstruksi *on-going* (terus berlanjut) untuk menentukan *sense* tentang “kita”.<sup>43</sup>

Narasi narasumber sebelum aktif dalam arena gerakan adalah tentang diskriminasi dan kesedihan. Pemaknaan mereka mengalami perubahan ketika mereka berinteraksi dengan sesama penyandang disabilitas lainnya. Terdapat variasi dalam proses menuju identitas kolektif dari aktor gerakan hak-hak disabilitas. Seperti yang dituturkan oleh narasumber SA<sup>44</sup>, pada awalnya pertemuan dengan sesama penyandang disabilitas menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan sebagai orang-orang yang termarginalkan. Saat itu, perasaan sepenanggungan tersebut belum berpengaruh pada tindakan kolektif untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Perasaan kebersamaan itu pada awalnya lebih cenderung pada solidaritas untuk saling menguatkan mental dan saling mendukung secara internal di dalam komunitasnya.

Identitas kolektif dari SA untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas mulai tumbuh dan berkembang ketika ia mengelola yayasan di Gianyar yang bergerak dalam isu disabilitas dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbagi pengetahuan tentang hak-hak disabilitas. Berbeda dengan SA, WD dan NL adalah orang yang sempat berinteraksi dengan penyandang disabilitas di luar Bali (Yogyakarta) dengan dukungan dari Yayasan YAKKUM Yogyakarta. Identitas kolektif mereka tumbuh dan berkembang di Yogyakarta dan memulai gerakan hak-hak disabilitas di kota tersebut.<sup>45</sup>

Identitas kolektif tidak semata-mata bersumber pada persamaan tujuan atau kepentingan, namun juga melibatkan emosi.<sup>46</sup> Emosi dari narasumber berhubungan dengan pengalaman masa lalu dari para aktor saat mengalami frustrasi dan depresi. Para narasumber menunjukkan raut wajah yang sedih dan bahkan menangis saat mengingat kembali pengalaman diskriminasi dan stigmatisasi mereka. Pengalaman tersebut justru menjadi pendorong bagi para aktor untuk melakukan perlawanan kolektif agar stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tidak terjadi seperti yang mereka alami. Adanya kaitan emosi dan pembentukan identitas kolektif bisa dilihat dari cerita narasumber NL. Narasumber NL setelah pulang ke Bali setelah beberapa tahun bekerja di YAKKUM Yogyakarta, membeli mobil bekas untuk digunakan berkeliling Bali mencari penyandang disabilitas yang terisolasi dari lingkungan sosial dan merasa malu dengan kondisi disabilitasnya. Ia berusaha untuk mencari bantuan alat bantu gerak untuk penyandang disabilitas fisik yang ia datangi. Ia mengingat dirinya pernah memiliki perasaan dan kondisi yang sama. Emosi positif dari NL telah membuatnya memiliki solidaritas dan identitas kolektif dengan penyandang disabilitas lainnya.<sup>47</sup>

Emosi dalam hubungannya dengan identitas kolektif juga berasal keseharian para aktor gerakan hak disabilitas. Menurut AY<sup>48</sup>, para penyandang disabilitas memiliki pertemuan rutin dengan para penyandang disabilitas lainnya yang memiliki ragam yang sama. Para penyandang disabilitas sensorik netra sering bertemu dalam wadah PERTUNI yang organisasi berjenjang dari tingkat nasional hingga daerah. Sementara itu, para penyandang disabilitas fisik lebih cenderung berinteraksi dalam wadah yayasan yang menaunginya. Semua

41 Taylor and Whittier, “Collective Identity in Social Movement Communities: Lesbian Feminist Mobilization,” 104–32.

42 Alberto Melucci, “The Symbolic Challenge of Contemporary Movements,” *Social Research* 52, no. 4 (1985): 789–816.

43 Melucci, *Challenging Code*.

44 SA, Interview.

45 WD, Interview; NL, Interview.

46 Jacqueline Adams, “The Bitter End: Emotions at a Movement’s Conclusion,” *Sociological Inquiry* 73, no. 1 (2003): 84–113, <https://doi.org/10.1111/1475-682X.00042>; De Volo Lorraine, “The Dynamics of Emotion and Activism: Grief, Gender, and Collective Identity in Revolutionary Nicaragua,” *Mobilization* 11, no. 4 (2006): 461–74, <https://doi.org/10.17813/Maiq.11.4.Q21r3432561121t7>; Scott A. Hunt and Robert D. Benford, “Collective Identity, Solidarity, and Commitment,” in *The Blackwell Companion to Social Movements*, ed. David A. Snow, Sarah A. Soule, and Hanspieter Kriesi (Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd., 2004), 433–458.

47 NL, Interview.

48 AY, Interview.

narasumber menyatakan bahwa mereka memiliki solidaritas ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas lainnya. Mereka berbagi cerita tentang stigma dan diskriminasi. Penentangan pada stigma dan diskriminasi, adalah dasar dari konsolidasi identitas kolektif dan solidaritas, dibandingkan dengan kepentingan bersama.<sup>49</sup> Emosi yang positif seperti kegembiraan dan antusiasme membuat aktivis gerakan sosial tetap bertahan dalam arena gerakan meskipun tujuan mereka tidak atau belum tercapai.<sup>50</sup>

Aksi-aksi kolektif yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas adalah dimensi *visible* (terlihat) dari gerakan sosial, sementara masa jeda antara dari satu aksi kolektif ke aksi kolektif berikutnya adalah dimensi laten. Dalam dimensi laten ini, potensi perlawanan terhadap stigma dan diskriminasi ditunai dalam wadah keseharian dari para aktor gerakan baik pada pusat-pusat komunitas penyandang disabilitas maupun ruang sosial lainnya. Sebagian besar aktivitas penting gerakan sosial berlangsung dalam dimensi laten. Interaksi dalam fase laten ini adalah laboratorium dari pengalaman. Masalah-masalah baru dan pertanyaan-pertanyaan diajukan. Jawaban baru ditemukan dan diuji, dan realitas dipersepsikan dan dinamai dengan cara yang berbeda.<sup>51</sup>

Dimensi *visible* dan laten dari gerakan penyandang disabilitas memiliki hubungan yang saling menguatkan. Aksi kolektif yang *visible* memberikan energi untuk memperbaharui solidaritas, memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok baru dan perekrutan anggota-anggota baru yang militan.<sup>52</sup> Narasumber MB menuturkan saat melakukan aksi kolektif di tempat umum, seseorang penyandang disabilitas menghampiri dan menyatakan ingin bergabung dalam komunitasnya. Hal itu menunjukkan bahwa aksi kolektif dapat menarik anggota baru.<sup>53</sup>

Baik dalam dimensi laten maupun *visible*, interaksi dalam gerakan sosial adalah persoalan masalah negosiasi identitas dan peran, “Siapa kita dan apa yang kita lakukan?”<sup>54</sup> Menurut teori interaksi simbolik, kita belajar melihat diri kita sendiri melalui mata orang lain. Cara kita memandang diri kita sebagian besar dipengaruhi oleh umpan balik dari yang kita dapatkan tentang diri kita sendiri dari orang-orang di sekitar kita. Mead menunjukkan perbedaan antara Aku sebagai “*I*” dan Aku sebagai “*Me*”. “*I*” adalah Sang Diri yang kita anggap sebagai individu. “*Me*” adalah Sang Diri yang diharapkan oleh masyarakat. Saat bertindak sebagai “*Me*”, kita melakukan sesuatu yang menjadi harapan masyarakat. Ada kalanya juga kita bertindak sebagai “*I*”. Ada percakapan yang terus menerus antara “*I*” dan “*Me*”.<sup>55</sup> Ada kalanya kita menuruti ekspektasi masyarakat dan ada pula kalanya kita melawan. Ketika perlawanan terjadi secara kolektif (gerakan sosial), maka masyarakat sedang menuju suatu perubahan sosial.<sup>56</sup> Dalam gerakan hak-hak disabilitas di Bali, interaksi di kalangan penyandang disabilitas adalah bentuk perlawanan terhadap stigma dari masyarakat. Mereka menolak pengkategorian kepada penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak mampu sehingga harus dikasihani.

### 3.3 Mobilisasi Gerakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Gerakan disabilitas di Bali mengalami pergeseran wacana seiring dengan ratifikasi *United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities* (UNCRPD)<sup>57</sup> oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2011. Sebelum ratifikasi UNCRPD, gerakan hak-hak disabilitas di Bali masih berfokus wacana dan upaya untuk saling membantu di kalangan penyandang disabilitas dan belum mengarah pada isu pemenuhan hak-hak disabilitas oleh negara dan penyadaran kepada publik. Hal ini terlihat misalnya dari pola gerakan yang dilakukan oleh NL

49 Alberto Melucci, “The Process of Collective Identity,” in *Social Movements and Culture*, ed. Hank Johnston and Bert Klandermans (Minnesota: University of Minnesota Press, 1995), 41–36.

50 Cristina Flesher Fominaya, “Collective Identity in Social Movements: Central Concepts and Debates,” *Sociology Compass* 4, no. 6 (2010): 393–404, <https://doi.org/10.1111/J.1751-9020.2010.00287.X>.

51 Melucci, “The Symbolic Challenge of Contemporary Movements.”

52 Melucci, *Challenging Code*.

53 MB, Interview oleh Penulis, Buleleng, 22 May, 2022.

54 Adamson, Kathryn Anne Grace, “The Ecology of Leadership: Examining the Relational Dynamics of Dyads through the Lens of Symbolic Interactionism” (Disertasi, Virginia Beach, Regent University, 2012).

55 Herbert G. Mead, *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviourist*. (Chicago: University of Chicago Press, 1934).

56 Stacey Hannem, “Symbolic Interactionism, Social Structure, and Social Change,” in *The Routledge International Handbook of Interactionism*, ed. Dirk Vom Lehn, Natalia Ruiz-Junco, and Gibson, Will (New York: Routledge, 2021), 194–204.

57 UNCRPD diadopsi oleh PBB secara resmi pada tanggal 13 Desember 2006 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008. UNCRPD terdiri atas 50 artikel. Pasal 5 sampai 30 menetapkan hak substantif penyandang disabilitas, sedangkan ketentuan lainnya menetapkan mekanisme untuk implementasi dan pemantauan. Tujuan UNCRPD adalah “untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan perolehan penuh dan setara dari semua HAM dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat mereka” (Pasal 1).

bersama dengan organisasinya dengan mengajak penyandang disabilitas dan keluarganya untuk mendapatkan alat bantu gerak sehingga dapat bersosialisasi untuk kemudian dapat menjadi mandiri. NL mengajak rekannya dari luar negeri untuk membantu pengajuan pendanaan dari lembaga donor internasional. Dukungan dana dari lembaga donor tersebut kemudian digunakan oleh lembaganya untuk memperluas layanan alat bantu disabilitas dan pemberdayaan kemandirian penyandang disabilitas hingga ke NTB dan NTT.<sup>58</sup>

Wacana dan pola gerakan yang berfokus pada penerahan sumber daya untuk saling membantu penyandang disabilitas juga muncul di simpul-simpul gerakan disabilitas lainnya seperti di Yayasan Bhakti Senang Hati. Di Yayasan Bhakti Senang Hati penerahan sumber daya gerakan dilakukan dengan penerapan kepemimpinan dan manajemen organisasi dari perintis organisasi atau komunitas. Narasumber SA dengan pengalamannya untuk bangkit dari pengurangan diri di dalam rumah, mendatangi penyandang disabilitas di berbagai tempat untuk diajak berkegiatan di yayasannya. Dengan kemampuannya dalam berbahasa Inggris dan desain, ia menjadikan yayasannya sebagai penyedia jasa *tour* di sekitar Ubud dengan menggunakan sepeda motor modifikasi. Ia dan rekan-rekannya menjadikan yayasannya sebagai tempat penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemandirian termasuk dalam kemandirian ekonomi. Yayasannya memiliki rumah makan dan salon yang dikelola oleh penyandang disabilitas. Upaya menjadi mandiri tersebut baginya adalah cara untuk melawan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.<sup>59</sup>

Ratifikasi UNCPRD membawa perubahan dalam pola gerakan hak-hak penyandang disabilitas di Bali. Melalui persebaran norma dalam UNCPRD, kalangan penyandang disabilitas mendapatkan pemahaman bahwa HAM adalah hak yang melekat pada masing-masing orang sebagai manusia. Perjanjian dan sumber hukum lainnya ditujukan untuk melindungi secara formal hak individu dan kelompok terhadap tindakan atau pengabaian oleh pemerintah yang mengganggu pelaksanaan HAM mereka.<sup>60</sup>

Ratifikasi UNCPRD menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan penyandang disabilitas. Pembuatan peraturan perundangan tersebut tidaklah terjadi secara linear dan otomatis dari level internasional ke level kabupaten/kota, melainkan terjadi karena adanya kontribusi dari gerakan hak-hak disabilitas baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam aktivismenya, para pelaku gerakan ini mengadvokasikan Perda tentang pemenuhan hak-hak disabilitas.

Di Bali, proses tindak lanjut dari ratifikasi UNCPRD lebih cepat dibandingkan dengan yang terjadi di tingkat nasional. Atas masukan dan desakan dari gerakan penyandang disabilitas, Pemda Provinsi Bali mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sementara di tingkat nasional UU tentang Penyandang Disabilitas baru muncul pada tahun 2016.<sup>61</sup>

Di samping perda pada level provinsi, aktivis hak-hak disabilitas di Bali juga mengadvokasikan perda-perda tentang perlindungan hak-hak disabilitas di level kabupaten/kota.<sup>62</sup> Salah satu wujudnya adalah memberikan naskah akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Pemda Kabupaten Gianyar.<sup>63</sup> Mereka juga terlibat secara langsung untuk memberikan penyadaran kepada publik dan pemberdayaan pada penyandang disabilitas, di antaranya dilakukan dengan konvoi sepeda motor modifikasi yang titik kumpulnya di lapangan terbuka. Di tempat tersebut mereka memberikan penjelasan kepada warga masyarakat yang sedang beraktivitas atau bahkan warga masyarakat yang tertarik untuk bertanya.<sup>64</sup>

Advokasi pada Perda yang berpihak pada hak-hak penyandang disabilitas dilakukan oleh para aktivis yang memiliki sumber daya untuk melakukan mobilisasi gerakan sosial. Sumber daya tersebut di antaranya adalah kemampuan manajerial, strategi, komunikasi, finansial, dan membangun jaringan baik di kalangan maupun di luar penyandang disabilitas. Kapasitas tersebut terbentuk dari pengalaman para aktivis dalam komunitas masing-masing. Mobilisasi gerakan tidak dengan serta merta dilakukan oleh orang-orang terdiskriminasi. Para penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dan stigmatisasi belum tentu akan masuk dalam arena gerakan sosial. Pilihan untuk masuk dalam arena gerakan adalah satu pilihan dari berbagai pilihan tindakan lainnya.<sup>65</sup> Dengan

58 NL, Interview.

59 SA, Interview.

60 UNOHCHR, "Human Rights: A Basic Handbook for UN Staf.," 2020.

61 NL, Interview.

62 NL, Interview; WD, Interview.

63 RedaksiBali.com, "Pemkab Gianyar Sambut Baik Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif dari Penyandang Disabilitas," *RedaksiBali.com*, May 18, 2021, <https://www.redaksibali.com/2021/05/pemkab-gianyar-sambut-baik-naskah-akademik-dan-draft-ranperda-inisiatif-dari-penyandang-disabilitas/>.

64 MB, Interview.

65 Craig J. Jenkins and Charles Perrow, "Insurgency of the Powerless: Farm Worker Movements," *American Sociological*

menggunakan sudut pandang teori sumber daya, perasaan kuat diperlakukan tidak adil, seperti yang dialami oleh penyandang disabilitas merupakan kondisi awal terjadinya gerakan sosial. Kelompok orang yang mengeluh, melibatkan diri dalam gerakan sosial, bila ada sumber daya yang mencukupi.<sup>66</sup>

Sikap Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi UNCRPD telah menjadi struktur kesempatan politik yang digunakan oleh aktivis gerakan hak-hak disabilitas di Indonesia untuk keberhasilan gerakan mereka. Struktur kesempatan politik adalah kondisi politik eksternal yang memberi keuntungan bagi gerakan penyandang disabilitas.<sup>67</sup> UNCRPD mengubah perspektif tentang disabilitas dari belas kasihan menjadi hak-hak untuk penyandang disabilitas. Sebelum ratifikasi UNCRPD, Indonesia menerapkan UU No. 4 Tahun 1997 yang menggunakan perspektif belas kasihan. Oleh UU ini, penyandang disabilitas dilihat sebagai masalah sosial yang penyelesaian masalahnya tergantung pada pihak lainnya baik (pemerintah) dalam bentuk rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Berbeda dengan UU No. 4 Tahun 1997 yang memosisikan negara berkewajiban untuk “mengupayakan” terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas, UNCRPD (pasal 4) mewajibkan negara-negara untuk mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan lainnya yang sesuai dalam penerapan UNCRPD, dan untuk mengubah atau menghapus undang-undang, undang-undang, peraturan, adat istiadat, dan praktik ada yang merupakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Negara-negara juga harus menunjuk atau menetapkan “mekanisme independen” untuk “mempromosikan, melindungi, dan memantau implementasi Konvensi ini” (Pasal 33).

Konsekuensi dari ratifikasi tersebut adalah rezim politik di Indonesia menjadi terbuka terhadap kemunculan aktor baru yang mengajukan klaim pada elite politik atau aktor yang sama yang mengajukan klaim politik yang berbeda dibanding sebelumnya. Menurut penuturan narasumber NL dan WD, pasca ratifikasi UNCRPD, organisasi-organisasi di tingkat nasional maupun daerah sering mengadakan pertemuan untuk membahas peraturan perundangan tentang penyandang disabilitas sebagai tindak lanjut dari ratifikasi tersebut. Dalam proses ini, ada sejumlah lembaga donor internasional yang turut memberikan bantuan dana untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan ini.

Ratifikasi pada UNCRPD juga memberikan kepercayaan diri yang lebih besar bagi para aktor gerakan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas lainnya, keluarganya, dan publik secara umum. Untuk meyakinkan para penyandang disabilitas dan keluarganya agar mereka dapat mandiri, aktivis gerakan hak-hak disabilitas di Bali menerapkan suatu strategi *framing* (bingkai). Bingkai adalah skema interpretatif yang digunakan orang untuk mengidentifikasi, memberi label, dan membuat peristiwa yang bermakna dalam hidup mereka.<sup>68</sup> Bingkai memungkinkan orang untuk memberi makna atas pengalamannya dan memandu tindakannya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam gerakan sosial. Salah satu tugas terpenting yang secara aktif terlibat dalam gerakan sosial adalah produksi makna bagi partisipan, antagonis, dan pengamat.<sup>69</sup> Artinya, peserta gerakan sosial secara aktif membangun kesadaran kolektif. Bagian sentral dari kesadaran kolektif adalah bingkai, atau keseluruhan sistem interpretasi yang memungkinkan individu untuk “menemukan, memahami, mengidentifikasi, dan melabeli kejadian”.<sup>70</sup>

Pengupasan bingkai adalah koreksi atas ketidaktepatan bingkai lama yang digunakan untuk melihat suatu masalah atau kelompok, sehingga dapat dihapus. Setelah dikupas, ruang kosong dibuat agar bingkai baru dapat dimasukkan. Hal ini tidak berarti mutlak bahwa bingkai baru akan menjadi perpanjangan dari bingkai yang diinginkan, tetapi ini bisa menjadi salah satu bentuknya. Pengupasan bingkai dapat dilakukan oleh gerakan sosial, melalui protes maupun cara lain. Ini juga dapat dibantu oleh konstituen yang sadar, terutama dalam publikasi akademis atau media, yang berusaha menunjukkan alasan bahwa kerangka lama sudah harus ditinggalkan.<sup>71</sup>

Aspek pertama dari bingkai lama yang harus dihilangkan adalah model gangguan medis. Dalam model tersebut, penyandang disabilitas dipandang memiliki masalah medis; karena itu mereka harus mengambil peran

---

*Review* 42, no. 2 (1977): 249–68, <https://doi.org/10.2307/2094604>.

66 Tilly Charles, *From Mobilization to Revolution* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1978).

67 Charles Tilly and Sydney Tarrow, *Contentious Politics* (New York: Oxford University Press, 2015); Sydney Tarrow, *Power in Movement: Social Movement: Collective Action and Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

68 Erving Goffman, *Goffman, Erving. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience* (New York: Harper & Row, 1974).

69 Hunt and Benford, “Collective Identity, Solidarity, and Commitment.”

70 David A. Snow et al., “Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation,” *American Sociological Review* 51, no. 4 (1986): 464–81, <https://doi.org/10.2307/2095581>.

71 Sharon Barnartt and Richard Scotch, *Disability Protest: Contentious Politics 1970-1999* (Washington, D.C.: Gallaudet University, 2021).

sakit. Pandangan ini mengasumsikan bahwa, karena penyandang disabilitas dianggap sakit, sehingga mereka dipandang tidak mampu melakukan tugas-tugas yang ditentukan secara sosial. Mereka membutuhkan bantuan dari dokter dan tenaga medis lain yang berspesialisasi dalam jenis patologi khusus. Mereka diharapkan untuk bekerja sama dengan tenaga medis tersebut hingga mereka sembuh.<sup>72</sup>

Bingkai kedua yang perlu diubah adalah pandangan bahwa disabilitas adalah peran sosial yang menyimpang. Pengecualian dari peran sosial yang normal berarti bahwa seseorang secara normatif menyimpang dan, oleh karena itu, distigmatisasi. Budaya mayoritas tidak menerima orang-orang yang terstigmatisasi atas dasar kesetaraan. Dengan demikian, stigma harus dihilangkan sebelum penyandang disabilitas bisa mencari integrasi dan kesempatan yang setara, yang merupakan bagian sentral dari bingkai hak-hak sipil.<sup>73</sup>

Bingkai yang ketiga yang perlu diganti adalah disabilitas yang dilihat oleh masyarakat sebagai masalah individu, oleh karena itu cara penyelesaian menurut bingkai lama ini, hanya melalui rehabilitasi dan upaya individu. Untuk melihat disabilitas sebagai masalah hak sipil dan penyandang disabilitas sebagai korban diskriminasi, pandangan tanggung jawab individu ini harus diubah. Persoalan diskriminasi pada disabilitas harus dilihat akar penyebabnya di masyarakat. Diskriminasi dapat diselesaikan di tingkat masyarakat. Diskriminasi bukannya disebabkan oleh dan diselesaikan oleh upaya individu.<sup>74</sup>

Untuk mengupas tiga bingkai lama tersebut, aktor-aktor gerakan hak disabilitas di Bali menggunakan berbagai cara untuk segmen yang berbeda. Saat mereka berbicara dengan instansi pemerintah, mereka akan merujuk pada UNCRPD sebagai perspektif baru dalam melihat disabilitas. Ketika berhadapan dengan masyarakat di akar rumput, aktivis gerakan hak disabilitas di Bali menggunakan tindakan sebagai bentuk komunikasi kepada khalayak luas untuk menunjukkan bahwa penyandang disabilitas bisa untuk menjadi mandiri jika diberikan kesempatan. Narasumber NL menyampaikan pengalamannya bertemu dengan penyandang disabilitas yang berumur tiga tahun. Atas seizin keluarganya anak itu disekolahkan hingga meraih gelar S-1 di Sampoerna University di Jakarta. Daya juang dan keberhasilannya menjadi cerita tentang perlawanan terhadap stigma kepada penyandang disabilitas yang dianggap tidak berkemampuan.<sup>75</sup> Cerita tersebut disebar oleh aktivis gerakan sebagai bagian dari upaya pembingkai (*framing*) untuk melawan stigma.

Narasumber NL menyatakan, Yayasan Puspadi melakukan pemberdayaan kepada para penyandang disabilitas yang ada di daerah terpencil dan mengalami stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Yayasan Puspadi memberdayakan orang-orang ini dengan memberikan mereka keterampilan. Ketika mereka sudah berhasil untuk menjadi mandiri, mereka kemudian dijadikan panutan oleh masyarakatnya. Bagi narasumber NL, secara perlahan hal itu mengubah bingkai-bingkai lama tentang disabilitas. Mereka secara tidak langsung menjadi duta dari kelompok disabilitas yang memberi pesan kepada publik bahwa mereka bisa berhasil dengan bermodal semangat juang dan adanya kesempatan. Bingkai penyandang disabilitas dengan cerita-cerita sukses ini sebagai dampak dari kerja organisasi, menurut NL, telah berhasil menarik perhatian dari pemerintah terhadap isu hak-hak disabilitas.<sup>76</sup>

Aktivistis penyandang disabilitas mengupas bingkai bahwa disabilitas adalah akibat karma pada kehidupan masa lalu. Narasumber WG menunjukkan bingkai baru dengan menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan setara. Bingkai ini ditunjukkan juga melalui logo Pertuni Bali yang memuat slogan “*Tat Twam Asi*” yang mengandung arti “Engkau adalah Aku”. Ini adalah ajaran Agama Hindu yang menyatakan bahwa jiwa manusia adalah atma yang sama. Karena manusia diciptakan setara, maka para pemimpin semestinya melakukan upaya untuk memberikan kesempatan agar penyandang disabilitas dapat memiliki kesetaraan.<sup>77</sup>

#### 4. Kesimpulan

Para narasumber penyandang disabilitas mengalami stigma dan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Stigma dan diskriminasi tersebut mengarah pada sikap putus asa dan depresi ketika tidak mengetahui ataupun tidak mendapatkan cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kesempatan untuk bertemu rekan-rekan penyandang disabilitas mengubah cara pandang narasumber bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Perasaan sepenanggungan menjadi bagian dari proses konstruksi identitas kolektif sebagai

72 Barnartt and Scotch,.

73 Barnartt and Scotch,.

74 Harlan Hahn, “The Politics of Physical Differences: Disability and Discrimination,” *Journal of Social Issues* 44, no. 1 (1998): 39–47, <https://doi.org/10.1111/J.1540-4560.1988.Tb02047.X>.

75 NL, Interview.

76 NL.

77 WG, Interview.

penyandang disabilitas, yang pada mulanya melibatkan perasaan bersama sebagai orang yang menghadapi masalah stigma dan diskriminasi, dan melibatkan solidaritas untuk saling mendukung di dalam komunitasnya. Konstruksi identitas kolektif tidak bisa dilepaskan dari identitas personal. Narasi personal dari narasumber yang mendapatkan stigma dan diskriminasi terkoneksi dengan identitas kolektifnya sebagai penyandang disabilitas yang melibatkan diri dalam arena gerakan sosial hak-hak disabilitas. Koneksitas antara identitas personal dan identitas kolektif membuat aktor gerakan dapat bertahan lama dalam gerakan sosial. Identitas kolektif bukan semata-mata instrumen untuk mencapai tujuan bersama namun juga ekspresi untuk mendapatkan solidaritas bersama. Identitas kolektif dari narasumber juga mengalami perluasan dari identitas kolektif sebagai penyandang disabilitas yang saling mendukung dalam komunitasnya, menjadi identitas kolektif pada organisasi gerakan sosial hak-hak disabilitas yang melakukan advokasi pada ruang wilayah tertentu. Perlawanan bersama melawan stigma dan diskriminasi telah menjadi ikatan perekat dari para aktor gerakan penyandang disabilitas yang terdiri dari berbagai ragam dan tersebar dalam berbagai organisasi dan komunitas penyandang disabilitas.

Identitas kolektif aktivis hak-hak disabilitas menjadi agensi dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Agensi tersebut mendapatkan dukungan dengan kehadiran UNCRPD yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2011. UNCRPD menjadi kesempatan politik bagi aktivis gerakan untuk memberikan penyadaran tentang hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Kesadaran tentang hak-hak tersebut mendorong para aktivis gerakan penyandang disabilitas untuk secara aktif mengadakan pertemuan dengan penyandang disabilitas dari berbagai ragam untuk membahas draf Rancangan Peraturan Daerah di Bali tentang pemenuhan hak-hak disabilitas untuk disuarakan dan diperjuangkan di seluruh Pemda di Bali. Para aktor gerakan menggunakan sumber daya yang digunakan untuk mobilisasi gerakan sosial, yaitu: kapasitas manajemen organisasi, relawan, donatur, serta kapasitas dari aktor pemimpin gerakan dalam merancang strategi dan tindakan untuk mengupas bingkai lama tentang disabilitas diganti dengan bingkai yang baru. Bingkai lama yang dimaksud adalah disabilitas sebagai persoalan medis, perilaku sosial menyimpang, dan tanggung jawab individu, lalu berganti menjadi bingkai baru yaitu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Penelitian ini menghasilkan saran yang bersifat praktis kepada organisasi gerakan hak-hak disabilitas untuk menyiapkan kaderisasi dan *mentoring* kepada aktivis gerakan yang lebih muda serta melibatkan dukungan dari berbagai kalangan termasuk di luar kelompok penyandang disabilitas. Keberlanjutan dari gerakan ini sangat penting karena konvensi dan peraturan perundangan tidak akan dengan sendirinya memenuhi hak-hak disabilitas, meskipun terdapat pasal-pasal eksplisit yang menyebutkan demikian. Implementasi dari aturan tersebut harus diperjuangkan secara kolektif agar dapat mendorong negara untuk menunjukkan tanggung jawabnya. Tindakan kolektif juga diperlukan untuk membongkar hegemoni di tengah-tengah masyarakat yang cenderung menstigmatisasi dan mendiskriminasi penyandang disabilitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada narasumber aktivis penyandang disabilitas di Bali yang telah berpartisipasi dalam menghadirkan narasi dari pengalamannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Jacqueline. "The Bitter End: Emotions at a Movement's Conclusion." *Sociological Inquiry* 73, no. 1 (2003): 84–113. <https://doi.org/10.1111/1475-682X.00042>.
- Adamson, Kathryn Anne Grace. "The Ecology of Leadership: Examining the Relational Dynamics of Dyads through the Lens of Symbolic Interactionism." Disertasi, Regent University, 2012.
- Aggleton, Peter, Kate Wood, and Anne Malcolm. "HIV-Related Stigma, Discrimination and Human Rights Violations." Geneva: UNAIDS, 2005. [https://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc999-humrightsviol\\_en.pdf](https://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc999-humrightsviol_en.pdf).
- Allen, Marion, and Jensen, Louise. "Hermeneutical Inquiry Meaning and Scope." *Western Journal of Nursing Research* 12 (1990): 241–53. <https://doi.org/10.1177/019394599001200209>.
- Barnartt, Sharon, and Richard Scotch. *Disability Protest: Contentious Politics 1970-1999*. Washington, D.C.: Gallaudet University, 2021.
- Burns, Tom R. "Towards a Theory of Structural Discrimination: Cultural, Institutional and Interactional Mechanisms of the 'European Dilemma.'" In *Identity, Belonging and Migration*, edited by Gerard Delanty, Ruth Wodak, and Paul Jones, 152–72. Liverpool: Liverpool University Press, 2008.
- Charles, Tilly. *From Mobilization to Revolution*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1978.

- Damai, Wayan. "Renungan Untuk Hari Cacat Sedunia." In *Suara Berbeda Dari Pulau Dewata*, edited by Anton Muhajir and Octavia Asmarani, 359–62. Denpasar: Bale Bengong, 2022.
- Den Brink, Amélie van, Willem Elbers, and Aisha Ibrahim. "Fragmented yet Together: The Disability Movement in Sierra Leone." *Disability & Society* 36, no. 7 (2021): 1035–52. <https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1782174>.
- Disability Convention Team. "Indonesia Shadow Report: Implementation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities." Indonesia, 2017.
- Edwards, Nicola. "Disability Rights in Indonesia? Problems with Ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities." *Australian Journal of Asian Law* 15, no. 1 (2014): 1–15.
- Fanu, Guy Le, Elena Schmidt, and Bhaviswa Virendrakumar. "Inclusive Education for Children with Visual Impairments in Sub-Saharan Africa: Realising the Promise of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities." *International Journal of Educational Development* 91 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102574>.
- Fominaya, Cristina Flesher. "Collective Identity in Social Movements: Central Concepts and Debates." *Sociology Compass* 4, no. 6 (2010): 393–404. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2010.00287.x>.
- Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1996): 167–91. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.
- Gibson, William, and Andrew Brown. *Working with Qualitative Data*. London: Sage, 2009.
- Giddens, Anthony. *Sociology*. Cambridge: Polity Press, 1993.
- Goffman, Erving. *Goffman, Erving. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. New York: Harper & Row, 1974.
- . *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1963.
- Hahn, Harlan. "The Politics of Physical Differences: Disability and Discrimination." *Journal of Social Issues* 44, no. 1 (1998): 39–47. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1988.tb02047.x>.
- Hannem, Stacey. "Symbolic Interactionism, Social Structure, and Social Change." In *The Routledge International Handbook of Interactionism*, edited by Dirk Vom Lehn, Natalia Ruiz-Junco, and Gibson, Will, 194–204. New York: Routledge, 2021.
- Hunt, Scott A., and Robert D. Benford. "Collective Identity, Solidarity, and Commitment." In *The Blackwell Companion to Social Movements*, edited by David A. Snow, Sarah A. Soule, and Hanspieter Kriesi, 433–458. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd., 2004.
- Jenkins, Craig J., and Charles Perrow. "Insurgency of the Powerless: Farm Worker Movements." *American Sociological Review* 42, no. 2 (1977): 249–68. <https://doi.org/10.2307/2094604>.
- Komnas HAM. "Mendorong Pengesahan 'Optional Protocol the Convention on the Rights of Persons with Disabilities' (OP-CRPD) Dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas," 2016.
- Kurzweily, Jonatan. "Being German, Paraguayan and Germanino: Exploring the Relation between Social and Personal Identity." *Identity: An International Journal of Theory and Research* 19, no. 2 (2019): 144–56. <https://doi.org/10.1080/15283488.2019.1604348>.
- Link, Bruce G., and Jo C. Phelan. "Stigma and Its Public Health Implications." *Lancet* 367 (2006): 528–29. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)68184-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68184-1).
- Lorraine, De Volo. "The Dynamics of Emotion and Activism: Grief, Gender, and Collective Identity in Revolutionary Nicaragua." *Mobilization* 11, no. 4 (2006): 461–74. <https://doi.org/10.17813/mai.11.4.Q21r3432561121t7>.
- Makkasau, A. "Gerakan Sosial Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar." Skripsi, UIN Alauddin, 2020.
- Manen, Max van. *Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy*. Albany: State University of New York Press, 1990.
- McAdams, Dan P. "The Psychology of Life Stories." *Review of General Psychology* 5, no. 2 (2001): 100–122. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.5.2.100>.
- Mead, Herbert G. *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviourist*. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Melucci, Alberto. *Challenging Code*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- . "The Process of Collective Identity." In *Social Movements and Culture*, edited by Hank Johnston and Bert Klandermans, 41–36. Minnesota: University of Minnesota Press, 1995.
- . "The Symbolic Challenge of Contemporary Movements." *Social Research* 52, no. 4 (1985): 789–816.
- Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Method*. London: Sage Publications, 1994.
- Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 131–50. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.

- Nisa, Uswatun. "Stigma Disabilitas Di Mata Orang Tua Anak Difabel Di Yogyakarta." *Inklusi* 50, no. 1 (2021): 75–88. <https://doi.org/10.14421/Ijds.080106>.
- Parameswara, Ananda Vita. "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Di Kota Palembang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019.
- Polleta, Francesca, and James M. Jasper. "Collective Identity and Social Movements." *Annual Review of Sociology* 27 (2001): (283-305. <https://Doi.Org/10.1146/Annurev.Soc.27.1.283>.
- Prastiwi, Rani. "Pergerakan Dan Perjuangan Difabel Di Kabupaten Gunung Kidul: Studi Kasus Forum Komunikasi Disabilitas Gunung Kidul." Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2009.
- RedaksiBali.com. "Pemkab Gianyar Sambut Baik Naskah Akademik Dan Draft Ranperda Inisiatif Dari Penyandang Disabilitas." *RedaksiBali.Com*, May 18, 2021. <https://www.redaksibali.com/2021/05/pemkab-gianyar-sambut-baik-naskah-akademik-dan-draft-ranperda-inisiatif-dari-penyandang-disabilitas/>.
- Snow, David A., and Robert D. Benford. "Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization." *International Social Movement Research* 1 (1988): 197–218.
- Snow, David A., Burke Rochford Jr., Steven K. Worden, and Robert D. Benford. "Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation." *American Sociological Review* 51, no. 4 (1986): 464–81. <https://Doi.Org/10.2307/2095581>.
- suaradewata.com. "12.086 Penduduk Penyandang Disabilitas Ada Di Bali," August 21, 2021. <https://www.suaradewata.com/read/202108230020/12-086-penduduk-penyandang-disabilitas-ada-di-bali.html>.
- Tan, Winshery, and Dyah Putri Ramadhani. "Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Batam." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>.
- Tarrow, Sydney. *Power in Movement: Social Movement: Collective Action and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Taylor, Verta, and Nancy E. Whittier. "Collective Identity in Social Movement Communities: Lesbian Feminist Mobilization." In *Frontiers in Social Movement Theory*, edited by Aldon D. Morris and Carol McClurg Mueller, 104–32. New Haven: Yale University Press, 1992.
- Tilly, Charles, and Sydney Tarrow. *Contentious Politics*. New York: Oxford University Press, 2015.
- Trani, Jean-Francois, Jacqueline Moodley, Paul Anand, Lauren Graham, and May Thu Thu Maw. "Stigma of Persons with Disabilities in South Africa: Uncovering Pathways from Discrimination to Depression and Low Self-Esteem." *Stigma of Persons with Disabilities in South Africa: Uncovering Pathways from Discrimination to Depression and Low Self-Esteem* 265 (2020): 1–12. <https://Doi.Org/10.1016/J.Socscimed.2020.113449>.
- Umiyati, Imaculata. *Aku Beda Dan Aku Bisa!* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- UNOHCHR. "Human Rights: A Basic Handbook for UN Staf.," 2020.
- Wood, Kate, and Peter Aggleton. "Stigma, Discrimination and Human Rights." London: Thomas Coram Research Unit Institute of Education, University of London, 2010.
- You, Dong Chul, and Se Kwang Hwang. "Achievements of and Challenges Facing the Korean Disabled People's Movement." *Disability & Society* 33, no. 8 (2018): 1259–79. <https://Doi.Org/10.1080/09687599.2018.1488676>.

**Pernyataan Penulis:**

**Konflik Kepentingan** - Dalam penulisan artikel ini, penulis menyatakan bahwa tidak ada potensi *Conflict of Interest* (benturan Kepentingan).

**Keaslian Tulisan** - Penulis menyatakan bahwa artikel jurnal ini bebas dari plagiarisme serta belum pernah/sedang dipublikasikan di jurnal lain.